

SUMMARY DISTRICT CITIZEN ENGAGEMENT PLAN

PROPINSI NUSA TENGGARAN BARAT – PULAU SUMBAWA

Kabupaten Bima

Visi Kabupaten Bima

Visi TKLD Kabupaten Bima “Ma **Katada, Katedi, Kataroa**” menggambarkan sebuah potret kabupaten, dimana warga & aparat mampu mengelola pembangunan secara mandiri, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, memiliki aturan tata ruang yang melindungi lahan-lahan subur sebagai lahan abadi untuk pertanian. Pertanian menjadi pilar pembangunan ‘Ketahanan Pangan Mandiri’ bagi warga secara berkelanjutan yang didukung oleh ketersediaan tenaga penyuluh pertanian yang berkualitas, system pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, ternak dikandangkan sehingga kotoran yang terkumpul menjadi bokasi, untuk stok pupuk ramah lingkungan. Ini mewujudkan Kabupaten Bima menjadi BIMA HIJAU dimana mata air mengalir sepanjang tahun dan pemanfaatan lahan tidur secara optimal yang didukung sarana prasarana jalan yang memadai sebagai arus keluar masuknya hasil panen sehingga memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.

Petani memiliki ketahanan pangan dengan hasil pertanian tidak terfokus pada satu jenis komodity dan mampu mengembangkan tanaman varietas local. Hal ini didukung adanya Pasar rakyat sebagai pusat ekonomi, BUMDES, Bank Peduli Rakyat (BPR) miskin dan LKM yang memberikan modal mudah dan bunga rendah. Kemudian adanya home industry yang dapat membuka jaringan pasar bagi hasil industry rumah tangga, memetakan potensi lokal yang ada dan mengoptimalkannya menjadi produk unggulan desa yang berkarakter khusus. Pemerintah memberikan pembinaan dan pendampingan untuk peningkatan ketrampilan maupun pasar bagi kelompok home industry. Sentra-sentra home industry, dilindungi oleh kebijakan pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat menjadi poin penting sehingga Petani dan organisasinya berdaya dan memiliki visi dan misi yang jelas dengan perkembangan anggotanya semakin banyak. Forum petani sebagai kelompok yang potensial dan memiliki posisi tawar/menentukan pembangunan daerah yang selaras dengan agropolitan, juga mampu menjembatani interaksi positif antara masyarakat tani dengan pemerintah. Forum beranggotakan petani garam, petani sawah, nelayan, merupakan kelompok yang potensial mendorong kebijakan di bidang pertanian mampu memperluas produksi pupuk bokasi.

Pemberdayaan warga dan peningkatan kapasitas warga, telah menjadikan warga desa mampu mengelola pembangunan desanya secara partisipatif dan mandiri. Kapasitas warga semakin meningkat dan memiliki kemampuan membangun jaringan kerja sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya. Perubahan perilaku masyarakat dengan memanfaatkan teknologi local Setiap warga mempunyai potensi menjadi pemimpin.

Perempuan berdaya dan berperan setara dalam proses pengambilan keputusan dalam musyawarah disetiap tahapan pembangunan yang di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi. Untuk itu diperlukan Penguatan SDM perempuan baik individu maupun dalam berkelompok serta kemampuan dalam membangun jaringan, penguatan ekonomi perempuan yg diperlukan untuk mendukung upaya pemberdayaan perempuan itu sendiri. Kesetaraan dan keadilan gender memberikan waktu dan ruang bagi perempuan untuk

berperan aktif dalam pembangunan desa. Perempuan dan laki-laki berperan setara, dan suara perempuan bisa disalurkan oleh perempuan itu sendiri. Perempuan menduduki posisi strategis di lembaga pemerintahan 30 % dan suara perempuan selalu masuk dalam agenda pembangunan. Posisi perempuan terus diakui mulai dari kades hingga muncul Bupati perempuan pertama di kab Bima. Adanya keseimbangan social, sehingga perempuan- laki-laki memiliki peran yang setara dalam pembangunan.

Untuk mendorong itu semua, otonomi desa menjadi sangat penting, desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan asset dan potensinya. Pemerintah desa yang kuat dan mampu mengelola pembangunan yang partisipatif dengan mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam pengelolaan potensi desa yang meliputi ADD, bantuan pemerintah kabupaten-propinsi dan pusat serta sumber pendapatan desa lainnya untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Zakat sebagai salah satu sumber pendapatan desa, dimana pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa secara transparan-akuntabel. Dengan demikian, tiga pilar penting dalam otonomi daerah (ekonomi, pendidikan dan kesehatan) terpenuhi sehingga tidak ada rakyat lapar, tidak ada pengemis, tidak ada lagi rakyat yang putus sekolah, tidak ada orang sakit yang tidak bisa dilayani oleh pusat layanan kesehatan. Rakyat mampu melakukan control terhadap institusi pelayanan public termasuk pengelolaan anggaran.

Sebagai upaya untuk mempercepat proses perubahan di kabupaten, salah satunya adalah mendorong semua actor (pemerintah, legislative, BPD, pengadilan-jaksa, guru, PPL, NGO, Ormas, dll) berperan aktif dalam proses pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Adanya rumah pengaduan sebagai rumah pelayanan public yang berfungsi sebagai pusat informasi, konseling bagi anak dan perempuan korban kekerasan, pegawai yang dipecat dan sebagainya. Masjid /tempat ibadah selain sebagai tempat beribadah juga dimanfaatkan sebagai pusat pembelajaran warga. Ruang public dimaksud menyangkut ruang berekspresi warga baik anak, perempuan, kelompok marjinal. Kantor bupati, kantor BAPPEDA berfungsi sebagai ruang public dan terbuka bagi warga untuk datang menyampaikan aspirasi pembangunan.

Program-program pembangunan diarahkan untuk peningkatan mutu pelayanan publik seperti : pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Kualitas layanan yang baik dapat tercapai apabila didukung adanya perubahan perilaku yang profesional sesuai dengan standard pelayanan minimal ditunjang dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan berkualitas. Di seluruh wilayah Kabupten Dompu diharapkan tersedia sarana pendidikan, akses terhadap pasar dan Bengkel Kesehatan Warga memberikan layanan secara cepat, tepat, bermutu, terjangkau bagi orang miskin selama 24 jam, serta pembangunan sarana prasarana pendukung yang benar-benar mempertimbangkan aspek yang ramah lingkungan.

Selain itu Penegakan hukum yang adil dan transparan dapat diwujudkan untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat miskin, anak, perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Sehingga tidak ada lagi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di kabupaten Dompu. Kesetaraan laki-laki dan perempuan terwujud.

Kebijakan yang pro poor perlu menjadi dasar keberpihakan kepada kelompok marginal, perempuan, anak-anak, lansia dan lainnya. Kebijakan tersebut ng dijalankan dengan optimal sehingga mampu menyediakan pelayanan dasar yang terjangkau dan berkualitas, serta mampu mendorong peningkatan pendapatan keluarga. APBD yang dirancang harus menggambarkan nilai belanja publik dan belanja aparat yang proporsional yang dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat banyak. Kebijakan yang ada perlu didukung oleh kekuatan kolektif dari kebersamaan para aktor pembangunan. Baik DPRD maupun eksekutif harus mampu merumuskan kebijakan secara optimal dan tidak diskriminatif. Dewan sendiri perlu berperan secara aktif dan

optimal dalam melaksanakan fungsi utamanya dalam penganggaran, legislasi dan pengawasan. Dewan secara terbuka hendaknya dapat menginformasikan agenda-agenda pentingnya kepada public, agar ruang komunikasi antara warga dan wakilnya dapat terjembatani dengan baik.

Peran media (Bima TV, Radio Komunitas, Koran dan media-media lainnya) dalam menyebarluaskan informasi yang berimbang dan proporsional mampu mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat. Selain itu peran media yang lain adalah sebagai alat komunikasi yang berkaitan dengan publikasi keberadaan asset, potensi dan keberhasilan pembangunan yang mudah dijangkau warga.

Kabupaten Bima akan menjadi kabupaten yang ***Tada, Tedi dan Taroa***, apabila memiliki pemimpin yang bertanggungjawab, amanah, berakhlak serta berpihak pada masyarakat miskin dan memiliki SDM yang berkualitas dalam menjalankan pembangunan, dengan menjunjung nilai-nilai agama, sosial budaya dan kearifan lokal serta memperhatikan kelestarian alam.

AGENDA KABUPATEN BIMA IMPIAN

Untuk mendukung visi tersebut diatas, maka beberapa agenda prioritas utama yang harus dilakukan untuk mendorong TKLD di Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi (SDA dan lingkungan , pasar, BUMDes). Pengelolaan lingkungan dan SDA ekonomi dilakukan secara partisipatif sehingga mampu meningkatkan ekonomi warga.
2. Pendidikan dan kesehatan
3. Penguatan kapasitas warga dan aparat
4. Hukum dan pengawasan
5. Media informatika dan transparansi

Summary Concept Paper

-01-

Kabupaten: Bima
Organisasi: Lembaga Pengembangan Partisipasi dan Ekonomi Rakyat (LP2DER)
 Bangun Daya Bima Berkoalisi dengan SOLUD, LUMBUNG dan CEDES
Judul: “Penguatan Kapasitas Kader Penggerak Pembangunan Masyarakat Desa (P/L) dan Forum Masyarakat Sipil dalam Mendorong Pembangunan yang Demokratis”
Usulan Lokasi: 60 Desa dari 16 Kecamatan di Kabupaten Bima. Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat
Usulan periode: 1 Mei 2010 s/d 31 Desember 2011 (20 Bulan)

LP2DER telah berpengalaman cukup dalam mengorganisir petani dan mendampingi kelompok petani di kabupaten Bima. Jejaring akar rumput yang luas membuat semangat untuk memperluas cakupan dari gerakannya melalui kolaborasi dengan SOLUD, LUMBUNG dan CEDES dalam sebuah rencana aksi untuk 60 desa di 16 kecamatan di kabupaten Bima. Mereka berkomitmen untuk mendorong terbangunnya satu tatanan sosial dimana masyarakat sipil - organisasi masyarakat sipil menjadi kuat dan bersinergi dalam menjalankan program pembangunan secara demokratis pada desa-desa di kabupaten Bima melalui *strategi mendorong peran kader-kader / aktor-aktor kunci dan forum masyarakat sipil yang ada pada masing-masing desa yang selama ini sudah difasilitasi sehingga tata pemerintahan lokal yang demokratis (TKLD) dapat diwujudkan*. Mereka akan bekerja dengan KPPMD sebanyak 480 orang (P240, L240). Harapannya Kader penggerak pembangunan masyarakat desa “KPPMD” memiliki pemahaman kritis, berpartisipasi aktif dan mensinergikan kekuatan forum masyarakat sipil dalam mendorong proses pembangunan yang demokratis di tingkat desa. LP2DER merancang strategy pendidikan dan penyadaran, pengorganisasian, jaringan desa dan kabupaten, dokumentasi, identifikasi asset desa, dan penguatan kapasitas. Inti rencana aksi ini ingin melakukan pemberdayaan warga desa dan organisasinya melalui pengelolaan pembangunan desa sebagai bagian dari rantai untuk mengimplementasikan visi dan agenda bersama kabupaten Bima dalam membangun tata pemerintahan lokal demokratis dari bawah.

-02-

Kabupaten: Bima
Organisasi: KAWAAL Bima
Judul: Meraih Kembali Kepercayaan Masyarakat melalui Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Pemerintahan yang baik.
Usulan Lokasi: Kabupaten Bima
Usulan periode: -

Rencana aksi” Meraih Kembali Kepercayaan Masyarakat melalui Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Pemerintahan yang baik” diusulkan oleh KAWAAL Bima. Lembaga ini memandang bahwa harus tersedia mekanisme, proses, dan kelembagaan di mana warga negara dan kelompok-kelompoknya dapat

mengungkapkan (menyatakan) kepentingan, memperjuangkan hak-hak, memenuhi kewajiban, dan mengelola perbedaan-perbedaan yang ada. Pemerintah disini mengemban fungsi pelayanan dimana Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga penting menetapkan indicator pelayanan untuk menjaga kualitas pelayanan. Usulan rencana aksi ini hendak melihat sejauhmana Pelayanan administrative, pelayanan barang dan pelayanan jasa yang disediakan oleh pemerintah benar-benar sesuai dengan indicator pelayanan minimum dan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Strategi yang ditawarkan secara tersirat adalah mendorong lahirnya standard pelayanan minimum dan advokasi kebijakan.

-03-

Kabupaten: Bima
Organisasi: Lembaga Advokasi Hak Anak dan peRempuan (LAHAR)
Judul Jaring Aman Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Bima
Usulan Lokasi: Kabupaten Bima
Usulan Periode: -

Lembaga Advokasi Hak Anak dan perempuan (LAHAR) memiliki pengalaman panjang dalam memfasilitasi upaya terkait dengan pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan sejak tahun 2008. Sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil yang hendak berkontribusi dalam mewujudkan tata pemerintahan lokal demokratis di kabupaten Bima mereka mengusulkan sebuah konsep apper yang diharapkan memiliki output terbangun RUMAH SOSIAL sebagai JARING AMAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN. Harapannya Rumah Sosial ini dapat melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan melalui berbagai media, membuka loket dan hotline pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan dengan menghidupkan kembali sistem penanganan terpadu. Melakukan pendampingan dan Layanan penguatan kapasitas, menginisiasi pusat krisis berbasis masyarakat melalui strategi pengorganisasian masyarakat dan mendesak lahirnya kebijakan responsif gender di tingkat lokal. Berkaitan dengan program ini telah diinisiasi oleh Forum Perempuan Bima pada tahun 2005 dengan melakukan hearing bersama DPRD Kabupaten dan Kota Bima serta pemerintah setempat. Mereka ingin mendorong upaya-upaya hingga dapat melahirkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang responsive gender.

-04-

Kabupaten: Bima
Organisasi: Lembaga Pengembangan Ilmu Teknologi dan Sumberdaya (LEINTSA)
Judul: Mendorong kekuatan masyarakat sipil dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin dan perempuan marjinal terhadap kesehatan dan pendidikan.
Usulan Lokasi: Kabupaten Bima
Usulan Periode: -

LEINTSA adalah salah satu lembaga yang memiliki pengalaman dalam melakukan advokasi hak-hak dasar warga. Untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan lokal demokratis, LEINTSA mengusulkan sebuah konsep paper untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status pendidikan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat (masyarakat miskin dan perempuan marjinal) di wilayah binaan (Kecamatan Wera, ambalawi, wawo, Sape, Langgudu, Parado, Woha, Belo, Palibelo, Bolo, Donggo, Soromandi, dan Madapangga). Rencana aksi ini hendak didorong secara khusus agar meningkatkan kemandirian warga masyarakat (miskin dan perempuan marjinal) dalam menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan pendidikan dasar melalui penguatan ekonomi dan kecukupan pangan, meningkatkan mutu dan kualitas pengelolaan layanan kesehatan dan pendidikan bagi warga masyarakat, ada pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai di semua wilayah binaan serta meningkatkan perilaku hidup sehat dan partisipasi warga dalam pendidikan dasar. Melalui konsep paper ini, LEINTSA menawarkan strategi antara lain : Penguatan kapasitas dan keterampilan masyarakat, aparat, dan kelembagaan OMS pemerintah yang ada di desa serta kaderisasi, Melakukan advokasi kebijakan layanan public (pendidikan dan kesehatan), koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Pemerintah, Mendorong akses masyarakat bidang ekonomi melalui penguatan keterampilan yang berbasis potensi local dan akses terhadap lembaga keuangan mikro, perencanaan program berorientasi pada masyarakat miskin dan membangun media belajar masyarakat. Rencana aksi ini dirancang untuk membangun sinergi dengan pihak-pihak lain yang terkait.

-05-

Kabupaten: Bima
Organisasi: Perkumpulan SOLUD
Judul: Membangun Kemandirian Masyarakat Melalui Optimalisasi Potensi Desa dan Sinergitas Pelaku Pembangunan dengan Pola Transparansi
Usulan Lokasi: Kabupaten Bima
Usulan Periode: -

Perkumpulan SOLUD merupakan sebuah organisasi masyarakat yang telah berkiprah dalam melakukan advokasi dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bima. Pengalaman dengan program-program seperti peningkatan kapasitas aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pro poor budget dan pengawasan ADD mendorong SOLUD menawarkan sebuah rencana aksi yang bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat melalui optimalisasi potensi desa dan sinergi pelaku pembangunan dengan pola transparansi. Secara khusus rencana aksinya hendak **membangun kemandirian masyarakat berdasarkan resource atau kekuatan yang ada di tingkat lokal (desa)**. Kemudian SOLUD juga ingin membangun hubungan kerjasama dengan berbagai elemen/komponen yang ada. Untuk menjamin keberlanjutan, mereka akan penciptaan model (contoh) yang mengedepankan prinsip transparansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, SOLUD merancang strategi-strategi seperti penguatan kapasitas masyarakat seperti pendidikan politik dan kewarganegaraan, advokasi, kampanye, pengawasan, data based, studi kasus, konsultasi dan koordinasi. SOLUD juga ingin mendorong pembuatan perusahaan desa yang akan diawali dengan pendataan potensi dan sumberdaya desa. Strategi lainnya, menyusun model komunikasi konsultasi intensif dengan anggota DPRD di masing-masing wilayah, mengembangkan model dan aplikasi pengelolaan ADD di tingkat desa yang partisipatif,

akomodatif dan transparan, menciptakan forum dengan aktor 'positif' (pemerintah daerah yang sepeham), penyusunan peta dan alur pembangunan jangka panjang, dan penciptaan dana abadi desa melalui sumber pendapatan asli desa. Rencana aksi ini dirancang untuk mengembangkan jejaring melalui pembentukan forum warga, memperkuat organisasi desa yang sudah ada, konsolidasi, mediasi/fasilitasi kelompok ekonomi, interaksi dinamis dengan stakeholder terkait, dan menciptakan wadah komunikasi informasi. Penerima manfaat utama dari rencana aksi ini adalah masyarakat, pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan pelaku ekonomi desa. Aktor-aktor yang akan terlibat antara lain warga, kelompok/organisasi masyarakat, organisasi desa, pemerintahan desa dan perusahaan (desa) dan perusahaan luar desa.

-06-

Kabupaten: **Bima**
Organisasi: Forum Masyarakat Tani (FMT)
Judul: Pengembangan pemasaran bersama komoditi Padi dan Kedelai di Kecamatan Donggo dan Madapangga Kab. Bima
Usulan Lokasi: **Desa Palama, Rora, Bumi Pajo Kecamatan Donggo dan Desa Ndano, desa Madawau Kecamatan Madapangga Kab. Bima**
Usulan Periode: -

Tantangan terbesar petani di Kecamatan Donggo dan Kecamatan Madapangga adalah rendahnya harga hasil panen dan rendahnya posisi tawar petani terhadap komoditasnya. Bagi para petani yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tani, mudahnya akses petani dalam menjaga kualitas produksi Padi dan kedelai akan meningkatkan posisi tawar mereka terhadap komoditas yang mereka hasilkan. Forum Masyarakat Tani menawarkan rencana aksi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi sehingga memudahkan akses terhadap pasar dan posisi tawarnya semakin meningkat. Mereka dapat mengembangkan inovasi-inovasi pertanian yang ramah lingkungan, meningkatkan kualitas hasil panen padi dan kedelai dan meningkatkan pendapatan petani anggota kelompok dan jaringan forum di wilayah program. Mereka menawarkan strategi dalam mencapai tujuan antara lain melalui Pengembangan kapasitas pengetahuan dan ketrampilan usaha tani padi dan kedelai dari produksi ke penanganan pasca panen, penguatan organisasi dan kapasitas forum tani sebagai alternative pemasaran, pengembangan demo plot, penguatan jaringan dan pengembangan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait. Penerima manfaat utamanya adalah petani (L/P) dan kelompoknya, dan forum tani.

-07-

Kabupaten: **Bima**
Organisasi: FP3M (Forum Peduli Pendidikan Perempuan Madapangga)
Judul: Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui peningkatan kapasitas perempuan pedesaan
Usulan Lokasi: **Desa Ndano dan Desa Madawau Kec. Madapangga**
Usulan Periode: -

FP3M (Forum Peduli Pendidikan Perempuan Madapangga) adalah sebuah wadah bagi anggota-anggotanya untuk melakukan sharing pengalaman, sharing informasi, dan menyuarakan aspirasi perempuan baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Fakta bahwa kemiskinan menjadi realitas di desa ndano dan sekitarnya mendorong FP3M menelaah bahwa peningkatan kapasitas perempuan ibu rumah tangga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Mereka juga meyakini

bahwa penanaman semangat berwirausaha sejak dini bagi remaja usia 13-18 tahun, akan menumbuhkan semangat mereka keluar dari kondisi kemiskinan. Mereka mengajukan sebuah konsep paper yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kesadaran perempuan sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam proses-proses pembangunan untuk mendorong berkurangnya angka kemiskinan di Pedesaan. Strategi yang mereka tawarkan adalah penguatan kapasitas, pendampingan dan sistensi tehnik, pengorganisasian kelompok perempuan, pengembangan usaha kecil, kolaborasi dengan stakeholder lainnya serta advokasi kebijakan. Penerima manfaat utamanya adalah kelompok perempuan, ibu rumah tangga, dan remaja putri 13-18 tahun.

-08-

Kabupaten: Bima
Organisasi: HISDI
Judul: Program Pengembangan Pakta Integritas Daerah dalam membangun Good Public Procurement Governance yang bersendikan Democtatic Lokal; Governance di Kab. Bima
Usulan Lokasi: Kabupaten Bima
Usulan Periode: -

Pakta Integritas adalah salah satu alat transparansi internasional yang membuka ruang dan peluang bagi masyarakat sipil untuk memantau pengadaan barang dan jasa dalam mendukung terwujudnya "Good public procurement governanve dengan prinsip democratic governance. HISDI berpandangan bahwa peran serta masyarakat dalam mendorong hal tersebut akan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. HISDI menggagas agenda aksi untuk menerapkan hal tersebut di kabupaten Bima. Tujuan utama dari rencana aksi tersebut adalah 1). Mendukung upaya pelembagaan keterlibatan masyarakat sipil dalam memantau pengadaan barang dan jasa, 2). Mendukung terwujudnya Good Public Procurement Governance "GPPG" pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersendikan prinsip-prinsip Tata Kepemerintahan Lokal yang Demokratis, 3). Membangun tatanan yang mengoptimalkan pemanfaatan modal pemerintah dan rakyat untuk mewujudkan visinya dan melindungi dari penyakit Korupsi. Adapun strategy yang mereka usulkan untuk mewujudkan tujuan tersebut meliputi penguatan kapasitas baik internal HISDI dan Tim PAKTA integritas, serta pembentukan tim Pakta Integritas serta pendampingan pelaksanaannya.